



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FARID WAJDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 483981

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 673.028.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.528.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/150 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 397.500.000
3. Tanah Seluas 1577 m2 di SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.400.000

1. MOTOR, HONDA REVO NF100 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 902.233.616

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.733.861.616

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.733.861.616

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

- Nama : **ANDI JAIRIN**
- Jabatan : **KEPALA BIDANG**
- NHK : **922679**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 129.000.000

- MOBIL, TOYOTA NEW AVANSA 1.3G M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
- MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.220.827

F. HARTA LAINNYA Rp. 18.000.000

Sub Total Rp. 492.220.827

III. HUTANG Rp. 211.176.563

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 281.044.264

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMY SUSANTI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3. NIK : 772067

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	81.700.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.00 M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI UW 125 SC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000		
3. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.900.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.038.038
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	105.638.038
III. HUTANG	Rp.	60.263.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (HJI)	Rp.	45.374.538

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimi sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah diumumkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komis Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : EMY SUSANTI
NIK : 6271014304740009
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Sub Unit Kerja : BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA
Jabatan : KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 15 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diterbitkan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Daftar kekurangan kelengkapan yang harus diisi dan dilengkapi oleh Sdr. IMELDA TERESIA (6271036803750002), KEPALA UPT - PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:

JENIS	URAIAN
Harta Bergerak Lainnya	Mohon dapat dicantumkan kepemilikan Harta Bergerak berupa perabotan rumah Tangga, barang elektronik, perhiasan & logam/batu mulia, barang seni/antik, persediaan dan harta bergerak lainnya
Penerimaan Kas	Isian Penerimaan Tunai harap diisi lengkap pada tiap kolom yang tersedia sesuai dengan penerimaan selama 1 tahun terakhir.
Pengeluaran Kas	Isian Pengeluaran Tunai harap diisi lengkap pada tiap kolom yang tersedia sesuai dengan pengeluaran selama 1 tahun terakhir.
Surat Kuasa	Mohon dikirimkan ke KPK Lampiran IV Surat Kuasa yang dicetak dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000 atas nama: 1. IMELDA TERESIA (Penyelenggara Negara) 2. JONI NEKAD (Suami) 3. KEVIN MARCHIANO (Anak Tanggungan) 4. JOANNA ALEXANDRA KRISTY (Anak Tanggungan) (Jika sudah mengirimkan Surat Kuasa, maka koreksi atas Surat Kuasa ini dapat diabaikan, jika ada kesulitan silakan konfirmasi ke nomor telepon Call Center LHKPN 198)

Keterangan :

1. Jika terdapat kekurangan kelengkapan Surat Kuasa dalam **tabel daftar kekurangan kelengkapan di atas**, mohon Surat Kuasa dicetak melalui aplikasi e-Filing LHKPN dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000 oleh setiap nama yg disebutkan dalam uraian dan dikirimkan format aslinya ke alamat :

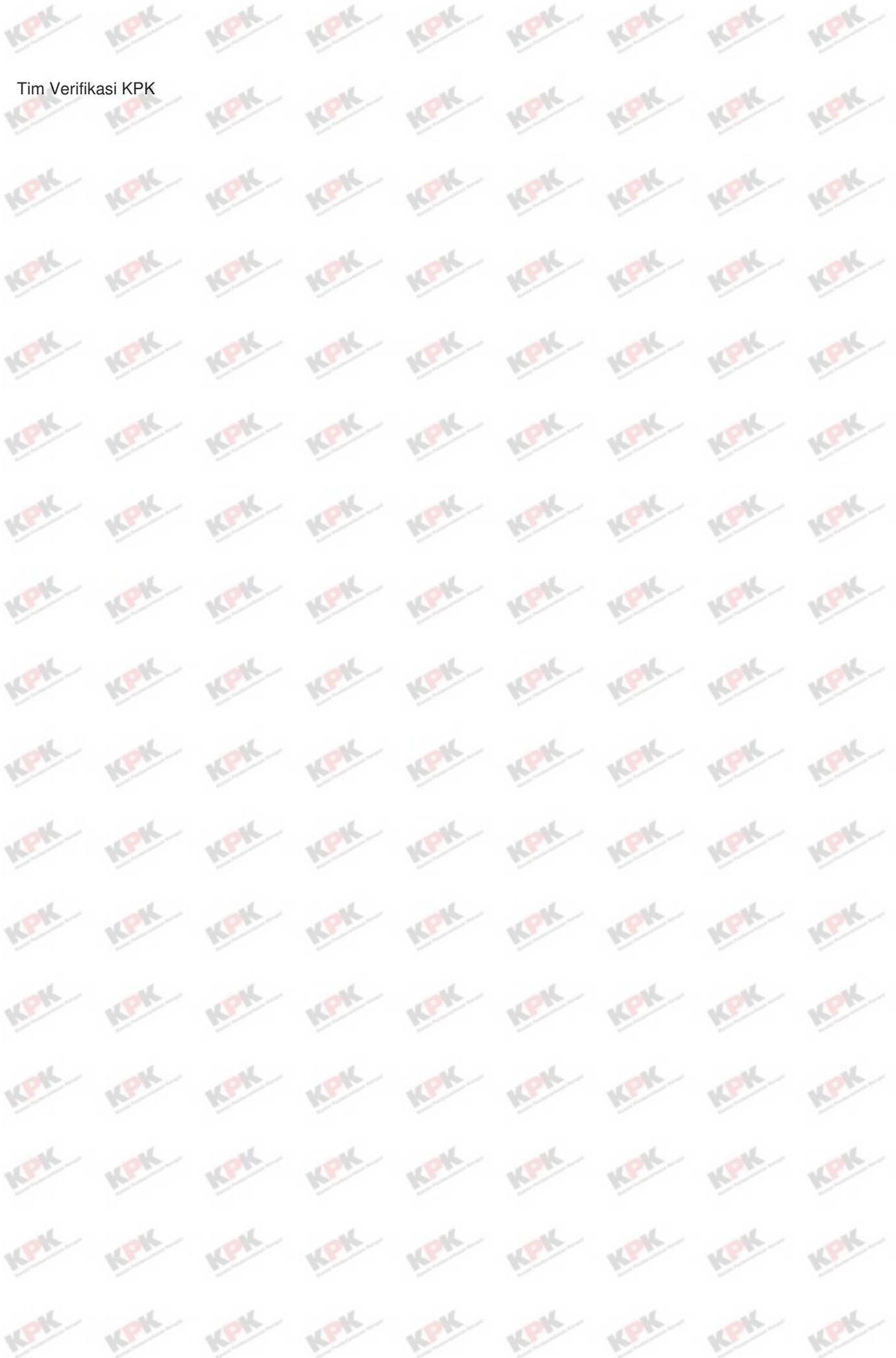
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi

Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

2. Bagi yang melaporkan LHKPN dengan menggunakan aplikasi e-Filing LHKPN (*online*) daftar kekurangan (selain surat kuasa) dapat dilengkapi dan diperbaiki melalui [melalui elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id)
3. Wajib LHKPN mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Tim Verifikasi KPK





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampalan/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIA FARIDA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
3. NHK : 923785

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m ² /76.5 m ² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m ² /76.5 m ² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m ² /80 m ² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	184.000.000
1. MOBIL, HONDA HR-V MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 5D (VEGA ZR) SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	106.021.495
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.740.021.495
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.740.021.495

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari sihkn.kpk.go.id. Seluruh data dan Informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui sihkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkaik tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara (dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MASJUAINI
NIK : 627103200966001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT
Jabatan : BENDAHARA
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 15 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini dibenarkan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASJUAINI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 403926

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	445.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
2. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
3. Tanah Seluas 50 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	79.500.000
1. MOTOR HONDA BEAT 125 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL TOYOTA MINIBUS/AVANSA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	—
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.500.500
F. HARTA LAINNYA	Rp.	—
Sub Total	Rp.	559.500.500
III. HUTANG	Rp.	82.846.966
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	476.653.534

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari e-laporan.lpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui e-laporan.lpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dapat oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman di atas dimuatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memuatkan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

- Nama : HERU SETIAWAN
- Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA
- NHK : 415720

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 395.500.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/90 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 395.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000

- MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.852.597

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 527.352.597

III. HUTANG Rp. 225.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 302.352.597

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

- Nama : NOOR AIDA
- Jabatan : ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- NHK : 659687

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 313.300.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 12.5 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 15.400.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 17.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 14.000.000

- MOTOR, REVO NF11T11C01 M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 14.520.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 86.499.216

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 428.319.216

III. HUTANG

Rp. 202.760.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 225.559.216

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMITDRI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 550708

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 17.500.000

1. MOTOR, YAMAHA ZUPITER Z 1 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA GTR 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.300.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.800.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 243.600.000

III. HUTANG Rp. 240.278.304

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.321.696

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Комиссия Рационализации Коррупции

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : WELDULINE
NIK : 6211054605800006
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Kerja : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
Sub Unit Kerja : BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 15 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.